

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Singkat Perusahaan**



Gambar 2.1. 1 Logo Kementerian Keuangan

Pada gambar 2.1.1 merupakan logo Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menggambarkan identitas dan representasi visual dari lembaga tersebut. Logo ini terdiri dari tiga elemen yaitu padi dan kapas, sayap, gada. Kementerian Keuangan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Kementerian ini dibentuk pada 1945, sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Sejak saat ini, kementerian ini memiliki tugas utama mengelola keuangan negara dan pembangunan ekonomi. Sejak didirikan, Kementerian Keuangan telah mengalami beberapa kali perubahan struktur dan fungsi. Saat ini, kementerian ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat luas, termasuk pengelolaan anggaran negara, pengaturan kebijakan ekonomi dan fiskal, pengelolaan utang negara, dan pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Kementerian Keuangan juga bertanggung jawab atas beberapa lembaga yang berkaitan dengan keuangan, seperti Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Awal Mula pada tanggal 12 Maret 1946, Presiden Soekarno membentuk Lembaga Keuangan Negara (LKN) yang bertugas

sebagai pengelola keuangan negara dan pembangunan ekonomi. Namun, pada tahun 1950, LKN digabungkan dengan Kementerian Perburuhan dan Kesejahteraan Sosial, dan berganti nama menjadi Kementerian Perekonomian. Barulah pada tahun 1966, Kementerian Perekonomian dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Sejak itu, Kementerian Keuangan menjadi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Perkembangan Seiring dengan perkembangan negara, tugas dan fungsi Kementerian Keuangan Indonesia pun berkembang. Pada tahun 1960-an, Kementerian Keuangan Indonesia mulai memperkenalkan sistem perencanaan dan pengendalian anggaran yang lebih baik. Pada tahun 1980-an, Kementerian Keuangan Indonesia memulai reformasi keuangan yang bertujuan untuk memperbaiki manajemen keuangan negara. Reformasi Keuangan reformasi keuangan yang dimulai pada tahun 1980-an terus berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2003, Kementerian Keuangan Indonesia meluncurkan program reformasi keuangan yang disebut dengan "Paket Kebijakan Ekonomi Indonesia". Paket kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. pada gambar 2.1.2 merupakan kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang beralamatkan di Gedung Djuanda I yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, Indonesia.



Gambar 2.1. 2 Gedung Kementerian Keunagan

## **2.1.1 Visi Misi**

### **2.1.1.1 Visi Kementerian Keuangan**

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

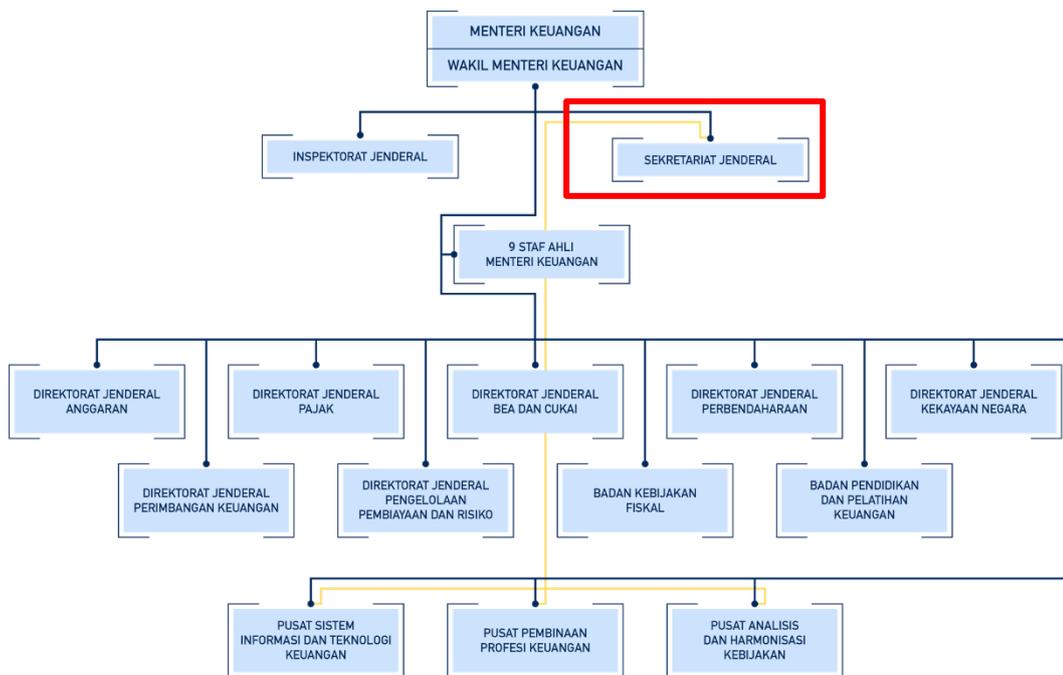
### **2.1.1.2 Misi Kementerian Keuangan**

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang *inovatif* dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Visi dan misi Kementerian Keuangan menggambarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan negara dengan profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, pada gambar 2.2.1 merupakan struktur organisasi Kementerian Keuangan Terdiri atas:



Gambar 2.2.1 Struktur Organisasi Kementerian Keuangan RI

Gambar 2.2. 1 Struktur Organisasi Kementerian Keuangan

Berikut merupakan penjelasan tugas dan fungsi dari masing-masing direktorat yang ada pada Kementerian Keuangan RI:

### A. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk menjalankan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan koordinasi pengawasan atas pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kementerian/Lembaga. Inspektorat Jenderal memiliki tugas, sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;

- Pelaksanaan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan.
- Koordinasi pengawasan atas pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kementerian / Lembaga.
- Pengawasan atas pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
- Pelaksanaan pembinaan dan asurans atas fungsi kepatuhan internal di lingkungan Kementerian Keuangan.
- Penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan.
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### B. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal memiliki tugas untuk menjalankan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Sekretariat Jenderal memiliki fungsi, sebagai berikut:

- Pengoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan.
- Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan.
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan.
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.

- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.